



**PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS)**

**TESIS**

**JUNAIDI  
1520922056**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**



**PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**JUNAIDI  
1520922056**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Junaidi

NRP : 1520922056

Tanggal : 20 Januari 2018

Jakarta, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Junaidi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junaidi  
NRP : 1520922056  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan  
kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas  
Royalti Non-eksklusif (Non Eklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah  
saya yang berjudul : **PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif  
ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan  
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Yang menyatakan



Junaidi

...

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Junaidi

NRP : 1520922056

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus No  
90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS)**

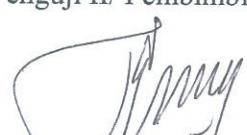
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N  
Ketua Pengaji

  
Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum  
Pengaji I / Pembimbing



  
Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn  
Pengaji II / Pembimbing

  
Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N  
Ka. Prodi

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal Ujian : 20 Januari 2018

**PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA TINDAKPIDANA  
KORUPSI (STUDI KASUS NO 90/PID.SUS.  
TPK/2013/PN.MKS)**

**JUNAIDI**

**ABSTRAK**

Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas hak-hak dasar tersangka, Pemeriksaan dan putusan secara in absentia juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang adil (due process of law) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) yang merupakan bagian dari HAM. 2. Peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Untuk itu Perlunya melakukan revisi KUHAP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan membuat ketentuan mengenai peradilan in absentia tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa, sehingga proses hukum tidak berlarut-larut.

**Kata Kunci :** Terdakwa, Korupsi, Absentia

***IN ABSENTEE'S JUDICIARY IN RELATION TO THE PROTECTION OF THE  
ACCUSED RIGHTS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
(CASE STUDY NO. 90 / PID.SUS. TPK / 2013 / PN.MKS)***

***JUNAIDI***

***ABSTRACT***

*The Justice In Absentia is an example of potential legal practice resulting in arbitrary and human rights abuses. Although not a violation of the fundamental rights of the suspect, the examination and verdict in absentia are also related to human rights due to the presence of the defendant in the criminal proceedings in essence to provide the defendant with the right to defend himself and to defend his / her rights of liberty, property the object or the honor. The presence of the defendant in the investigation of a criminal matter is essentially to provide the defendant with the right to defend himself and defend his or her rights of liberty, property or honor. The main objective is for the defendant to understand exactly what is being indicted, how the testimony of witnesses, experts and other evidences, so that he is free and free to manage his answers and his defense. The purpose of this study is 1. To analyze the conception of judiciary in absentia when associated with human rights (human rights) in this case the defendant's human rights corruption. 2. To analyze the role of judges in the process of criminal justice examination in absentia. With the normative juridical research method it is known that 1. The judicial conception in absentia when it is associated with human rights in this case the defendant's human right is corruption based on due process of law where the rights of the perpetrators of crime are protected and is considered a part of the rights of citizens (civil rights) that are part of human rights. 2. The role of the judge in the process of examining criminal justice in absentia according to the right and authority of the judge according to the Judicial Authority Law Number 4 of 2004 and No.48 of 2009. The Judge shall not refuse to examine the case (Judging), hear judgment is a series of judicial actions, to receive examining and deciding criminal cases on the basis of free, fair and impartial principles in court. Therefore, the need to revise the Criminal Procedure Code (KUHAP) in the Corruption Criminal Act by making provisions on the trial in absentia without prejudice to the rights of the accused, so that the legal process does not drag on.*

***Keywords : Defendant, Corruption, Absentia***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

### **PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS)**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku PembimbingI.
5. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 20 Januari 2018

Junaidi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian.....	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	7
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
I.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
I.5.2. Kerangka Konseptual .....	28
I.6. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
II.1.Peradilan.....	31
II.1.1. Asas-Asas Peradilan .....	31
II.1.2. Ketentuan Umum Proses Peradilan Pidana .....	35
II.1.3. Prinsip Hadirnya Terdakwa di Sidang Pengadilan.....	43
II.2. Peradilan In Absentia .....	46
II.2.1.Pengaturan Peradilan In Absentia Dalam Hukum Pidana.....	46
II.2.2.Implementasi Peradilan In Absentia .....	45
II.2.3.Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia.....	57
II.2.4.Konsepsi dan Dasar Hukum Peradilan In Absentia .....	63
II.3. Tindak Pidana.....	71
II.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	71
II.3.2.Jenis-jenis Tindak Pidana.....	73

II.4.Tindak Pidana Korupsi.....	73
II.4.1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	73
II.4.2.Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	77
II.4.3.Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	81
II.5.Peradilan In Absensia Untuk Tindak Pidana Korupsi.....	82
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
III.1. Tipe Penelitian .....	86
III.2. Sifat Penelitian .....	86
III.3. Sumber Data.....	87
III.4. Metode Pengumpul Data.....	88
III.5. Metode Analisis data.....	89
 <b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN.....</b>	<b>90</b>
IV.1. Konsepsi Peradilan In Absentia Apabila Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hal Ini Hak Asasi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	90
IV.2. Peranan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Peradilan In Absentia .....	100
IV.2.1.Tindak Pidana Korupsi Di kaitkan dengan Hak-hak Terdakwa Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/ PN.MKS .....	100
IV.2.2.Peranan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Peradilan Pidana In Absentia .....	121
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
V.1. Kesimpulan .....	134
V.2.Saran .....	135

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**